

OPTIMALISASI PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Arifah Ashari¹⁾, Martinus Robert H.²⁾, Mansyur³⁾

Prodi Akuntansi, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia¹⁾²⁾³⁾
arifahashari@yahoo.com

Abstract- The research aims to find out the Realiasi of Taxes and Regional Retributions of the Government of Samarinda City whether it has been Optimal or not in terms of Realization of Tax Revenue and Regional Retribution. And to know which Taxes and Retributions are not optimal. This research is descriptive qualitative research and to collect data used purposive sampling. Data collection methods used are interviews, observation and documentation. Data analysis techniques used are Data Collection, Data reduction, Data presentation and Withdrawal Conclusions. Based on the results of the study that there are several objects of tax and regional levies that have revenue realization that exceeds the budget target and there are also some tax objects and provincial levies which the level of revenue realization still needs to be more optimized.

Keywords - Optimizing Taxes and Regional Retributions

Abstrak - Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui Realiasi Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Samarinda apakah sudah Optimal atau belum dari segi Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah. dan untuk mengetahui Pajak dan Retribusi Daerah yang mana saja belum optimal. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif Kualitatif dan untuk mengumpulkan data digunakan Purposive Sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah Pengumpulan Data, reduksi Data, sajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Terdapat beberapa objek Pajak dan Retribusi Daerah yang memiliki Realisasi Penerimaan yang melebihi Target Anggaran Pandapatan dan ada juga beberapa Objek Pajak dan Retribusi Daerah yang tingkat Realisasi penerimaan masih perlu untuk lebih dioptimalkan

Kata kunci: Optimisasi Pajak dan Retribusi Daerah

Pendahuluan

Pendapatan Asli Daerah adalah merupakan kemandirian daerah dalam rangka meningkatkan Pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pajak dan Retribusi daerah merupakan dua dari beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mana dua elemen ini memiliki kontribusi terbesar bagi sumber Penerimaan Daerah yang dapat dilihat didalam Anggaran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan rencana kegiatan Pemerintah Dearah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan Biaya yang merupakan batas maksimal untuk suatu periode Anggaran (Halim, 2002). Secara Historis Pemerintah Kota Samarinda sendiri masih sangat tergantung dengan Pembiayaan (Dana Perimbangan) dari Pemerintah Pusat, yang mana hampir 70 % Pendapatan yang dimasuk dalam KasPemerintah Kota Samarinda bersumber dari Dana Perimbangan dari Pusat, sedangkan PendapatanAsli Daerah (PAD) Kota Samarindahanyamenyumbang $\pm 30\%$ dari Total Anggaran Pendapatan Daerah.

Melihat dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang hanya menyumbang penerimaan sebesar Rp391.404.293.290,97 dari Total Pendapatan Daerah sebesar Rp2.437.626.649.388,97 atau $\pm 20\%$ dari total Pendapatan Pemerintah Kota Samarinda. Serta melihat dari Penerimaan Daerah dari PAD Kota Samarinda dari Tahun ketahun yang masih sangat tergantung dengan Bantuan/Dana

Pembangunan dari Pusat, maka Pemerintah Kota Samarinda dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah dituntut lebih optimal dalam menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda. Adapun Tingkat kemandirian Daerah untuk membiayai Belanja/Pengeluaran bagi pembangunan daerah dapat dilihat dari rasio kemandirian sebagai berikut:

Tabell.1.1 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun	PA D	Dana Peimbangan	Rasio (%)
2015	419.745.787.641,01	2.065.817.710.283,00	20.32%
2016	391.404.293.290,97	1.811.489.273.098,00	21.61%
2017	519.640.806.807,82	1,590,790,219,872.00	32.67%

Dan berdasarkan fakta di atas, peneliti tertarik meneliti di Kota Samarinda (Bapenda) dalam peningkatan/potensi Pengoptimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pajak dan Retribusi mana sajakah yang sudah digali secara optimal oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda.

Metode Penelitian

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode Analisis Deskriptif Komparatif. Dalam menganalisis dan menguji kebenaran dari hipotesis yang telah diambil, maka digunakan peralatan statistc yang dapat dihitung dengan rumus. Dan digunakan untuk mengetahui seberapa optimal dan tidaknya pencapaian dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Samarinda. Adapun rumusnya Tingkat Pencapaian Target adalah sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

P = Tingkat Pencapaian Target

F = Realisasi Penerimaan

Pajak N = Target Anggaran

Pendapatan

1. Pajak Daerah

$$\text{Tingkat Pencapaian Target} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Pajak Target Penerimaan Pajak}} \times 100$$

2. Retribusi Daerah

$$\text{Tingkat Pencapaian Target} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi}}{\text{Target Penerimaan Retribusi}} \times 100$$

Tablel 3.1 Alat Analisis Deskriptif Komparatif

Tahun Anggaran	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Tingkat Pencapaian Target	Kriteria
2015	Rp.xx x	Rp.xx x	Rp.xx x	
2016	Rp.xx x	Rp.xx x	Rp.xx x	
2017	Rp.xx x	Rp.xx x	Rp.xx x	

Tabel 3.2. Kreteria Tingkat Penilaian Pencapaian Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

No.	Presentase Pencapaian Penerimaan	Kriteria
1.	Diatas 100%	Sangat Optimal
2.	91% – 100%	Optimal
3.	81% – 90%	Cukup Optimal
4.	60% – 80%	Kurang Optimal
5.	Kurang 60%	Tidak Optimal

Sumber Depdagri, kemendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Pencapaian Target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Target Pendapatan, sesuai dengan Sumber Depdagri, kemendagri No. 690.900.327 Tahun 1996, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Diduga Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Tahun 2015 s/d 2017 mengalami fluktuatif dan tidak mencapai Target Anggaran yang ditetapkan maka hipotesis dapat diterima”

Pengukuran tingkat Pencapaian/Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah

Tabel 2
Analisis Target Pencapaian Pajak 2015 – 2017 Per Rincian Objek

N o.	Uraian	Anggaran	Realisasi	HASIL PENCAP AIN	Presen tase (%)
1	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	81,500,000,00 0.00	106,189,463,9 61.22	Sangat Optimal	130.29
2	Pajak Penerangan Jalan	262,500,000,0 00.00	273,314,513,2 14.55	Sangat Optimal	104.12
3	Pajak Hotel	69,500,000,00 0.00	72,345,138,54 3.26	Sangat Optimal	104.09
4	Pajak Restoran	117,500,000,0 00.00	119,602,360,9 42.93	Sangat Optimal	101.79
5	Pajak Hiburan	51,500,000,00 0.00	51,659,547,22 7.25	Sangat Optimal	100.31
6	Pajak Reklame	21,571,200,00 0.00	21,356,699,56 5.83	Optimal	99.01
7	Pajak Parkir	22,500,000,00 0.00	21,741,217,13 5.25	Optimal	96.63
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	182,650,000,0 00.00	132,651,984,9 13.34	Kurang Optimal	72.63

9	Pajak Air Tanah	165,000,000.00	119,482,873.24	Kurang Optimal	72.41
10	Pajak Sarang Burung Walet	150,000,000.00	47,743,600.00	Tidak Optimal	31.83
11	Pajak Mineral Bukan Log & Bantuan	1,600,000,000.00	153,958,300.00	Tidak Optimal	9.62
Jumlah Keseluruhan periode 2015 s/d 2017		811,136,200,000.00	799,182,110,276.87	Optimal	98.87

Tabel 3. Presentase Penerimaan Pajak

Tahun	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Rasio (%)
2015	257,845,000,000.00	244,079,216,597.34	94.66%
2016	290,510,000,000.00	256,130,052,909.60	88.17%
2017	262,781,200,000.00	298,972,840,769.93	113.77%
2015-2017	811,136,200,000.00	799,182,110,276.87	98.87%

Pengukuran tingkat Pencapaian/Optimalisasi Pendapatan Retribusi Daerah

Table 4. Analisis Target Pencapaian Retribusi 2015 – 2017 Per Rincian Objek

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Target Pencapaian	Presentase (%)
1	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	200,000,000.00	412,426,180.00	Sangat Optimal	206.21
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	41,226,881,000.00	45,786,571,529.00	Sangat Optimal	111.06
3	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesangrahan/ Villa	500,000,000.00	547,471,773.00	Sangat Optimal	109.49
4	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	295,825,000.00	313,890,500.00	Sangat Optimal	106.11
5	Retribusi Izin Gangguan	14,000,000,000.00	14,788,086,342.00	Sangat Optimal	105.63
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	851,213,000.00	857,176,753.00	Sangat Optimal	100.70
7	Retribusi Tempat Pelelangan	1,075,000,000.00	1,082,000,000.00	Sangat Optimal	100.65
8	Retribusi Pelayanan Pasar	12,000,000,000.00	12,051,489,750.00	Sangat Optimal	100.43
9	Retribusi Tempat Khusus Parkir	120,000,000.00	120,000,000.00	Sangat Optimal	100.00
10	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	6,960,011,500.00	6,801,425,500.00	Optimal	97.72
11	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	3,100,000,000.00	2,810,500,000.00	Optimal	90.66
12	Retribusi Rumah Potong Hewan	1,600,000,000.00	1,403,811,000.00	Cukup	87.74

				Optimal	
13	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1,150,000,000.00	987,636,000.00	Cukup Optimal	85.88
14	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	25,001,999,500.00	20,404,852,000.00	Cukup Optimal	81.61
15	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	59,000,000,000.00	47,212,505,907.00	Cukup Optimal	80.02
16	Retribusi Terminal	787,320,000.00	605,474,000.00	Kurang Optimal	76.90
17	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	268,855,000.00	198,477,500.00	Kurang Optimal	73.82
18	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	9,830,000,000.00	5,871,072,000.00	Tidak Optimal	59.73
19	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	320,000,000.00	177,742,800.00	Tidak Optimal	55.54
20	Retribusi Izin Trayek	200,005,000.00	109,300,000.00	Tidak Optimal	54.65
21	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1,350,000,000.00	358,569,840.00	Tidak Optimal	26.56
22	Retribusi Pelayanan Kesehatan	23,866,500,000.00	4,581,855,880.00	Tidak Optimal	19.20
23	Retribusi Izin Perikanan	4,500,000.00	500,000.00	Tidak Optimal	11.11
2 2	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	11,000,000.00	415,000.00	Tidak Optimal	3.77

Tabel 6 Presentase Penerimaan Retribusi

Tahun	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Rasio (%)
2015	73,541,962,180.00	61,824,059,131.00	84.07%
2016	79,724,248,000.00	58,591,942,122.00	73.49%
2017	67,832,877,000.00	52,123,941,557.00	76.84%
2015-2017	221,099,087,180.00	172,539,942,810.	78,04%

Hasil Ukuran Pencapaian Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tabel 7 Hasil Akhir

No.	Presentase Pencapaian Penerimaan	Kriteria	Target Pencapaian
1.	Diatas 100%	Sangat Optimal	88.45 %
2.	91% – 100%	Optimal	
3.	81% – 90%	Cukup Optimal	
4.	60% – 80%	Kurang Optimal	
5.	Kurang 60%	Tidak Optimal	

Sumber Depdagri, kemendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

Berdasarkan Hasil Pembahasan hasil analisis data yang dilakukan peneliti, dapat diketahui bahwa Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam kurang waktu 3 Tahun period Akuntansi (2015 s/d 2017) hanya berada di posisi 81% - 90% atau posisi ketiga (Cukup Optimal) yaitu dengan presentase 88,15% setelah penerimaan Pajak dan Retribusi daerah di akumulasikan. Hal

ini menunjukkan bahwa hipotesis *diduga Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah belum optimal* sesuai dengan hasil analisa yang ada karena hasil perhitungan menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah belum mencapai Target Anggaran Pendapatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Samarinda. Bahkan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah cenderung fluktuatif (Naik turun). Bahkan untuk penerimaan Retribusi dalam kurung waktu 2015 sd 2017 tidak pernah mencapai Target Anggaran Pendapatan, dengan demikian maka hipotesis yang terdapat dalam proposal peneliti dapat diterima.

Salah satu sebab tidak tercapainya Realisasi Penerimaan terhadap Target Anggaran Pendapatan salah satunya adalah pengawasan Objek Pajak dan Pendataan yang kurang di lapangan. Terutama pada Retribusi Daerah yang mana ada beberapa Bagian Retribusi yang penerimaannya di duga bocor dan tidak dapat di punggut secara maksimal oleh Pemerintah. Dan ada juga objek pajak yang penerimaan setiap tahunnya menurun di karenakan kondisi alam dan kondisi Pasar.

Selain itu terdapat juga Retribusi Daerah yang menyumbang penerimaan terbanyak tetapi dihapuskan dikarenakan harus menunggu kejelasan undang – undang, serta kecurangan – kecurangan para objek Pajak dalam pelaporan jumlah pajak yang di terima dan yang disetor ke pemerintah sehingga hal ini menjadi salah satu alasan tidak tercapainya penerimaan Pajak Daerah di beberapa objek pajak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data yang ada di dalam penelitian ini, dan telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah pada periode 2015 s/d 2017 mengalami flutuatif/ naik turun yang mana pada Realisasi pajak Daerah sendiri hanya pada periode 2017 yang mencapai Realisasi 113% dari Target Anggaran yang di tetapkan, sedangkan pada periode 2015 s/d 2017 Realisasi Penerimaannya tidak mencapai Target Anggaran Pendapatan yang di tetapkan oleh Pemerintah, sedangkan untuk Penerimaan Realisasi Retribusi Cenderung mengalami penurunan Realisasi Penerimaan dibandingkan dengan Pajak Daerah, yang mana selama periode 2015 s/d 2017 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah tidak pernah mencapai 85% dari Target Anggaran Pendapatan yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahmudi, 2009, Manajemen Keuangan Daerah, PT. Gelora Aksara Pratama. Kamus BESAR Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), 1994.
- Machfud Sidik, “Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah”,
- Syukur Abdullah, Kumpulan Makalah “*Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*”, Ujung Pandang: Persadi, 1987.
- Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah, 2013.
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13,14,15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu
- Ahmad Yani, 2008, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Hanif Nurcholih, 2007, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, PT. Grasindo, Jakarta.
- Sutrisno, 2007, Manajemen Keuangan: Teori, Konsep dan Aplikasi, Ekonisia T, Yogyakarta.

- Erly Suandy, 2002, Hukum Pajak Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta. ilmudasar.com/2017/09/Pengertian-fungsi-sumber-unsur-pajakdaerah Marihot P. Siahaan, Op.Cit
- Soemarsono, 2007, Perpajakan Pendekatan Komprehensif, Salemba Empat, Jakarta
- Marihot P Siahaan, 2008. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PT. Rajagrafindo.Persada,Jakarta
- Sugiono, 2008, Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.